

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perbatasan negara merupakan kawasan yang sangat penting maupun utama bagi sebuah negara seperti halnya Indonesia. Diakatakan penting karena pada dasarnya perbatasan negara memegang peranan penting dalam penentuan batas-batas wilayah, kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah sebuah negara. Adapun peranan-peranan tersebut dalam banyak hal ditentukan maupun dipengaruhi oleh proses historis, politik, hukum nasional maupun hukum internasional.

Secara fisik Indonesia merupakan negara yang mempunyai dua bentuk perbatasan yaitu darat dan laut (perairan). Adapun kawasan Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara lain adalah Propinsi Kalimantan Barat yaitu terdapat lima pintu perbatasan (gate) yang sedang dikembangkan untuk menghubungkan kedua negara, yakni Entikong di Kabupaten Sanggau, Aruk di Kabupaten Sambas, Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Jasa di Kabupaten Sintang, dan Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai sebuah daerah yang mempunyai letak geografis yang berdekatan dengan Malaysia, maka kedua daerah ini cenderung memiliki kebudayaan yang sama seperti persamaan bahasa, tradisi dan lain sebagainya

Persamaan-persamaan inilah yang membuat suatu ikatan yang kuat antara kedua masyarakat tersebut, sehingga adapun yang menjadi perbedaan antara masyarakat ini hanyalah politik negara mereka masing-masing. Selain itu, Aruk sebagai kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia pada hakikatnya mempunyai nilai-nilai yang strategis yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Adapun nilai-nilai strategis yang dimiliki oleh kawasan perbatasan yaitu seperti mempunyai potensi sumber daya alam yang cukup besar serta letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara lain yang dapat menimbulkan keterikatan yang kuat ke bidang-bidang lainnya seperti sosial budaya, pertahanan keamanan, terutama sekali dalam bidang ekonomi. Sebelumnya pada tahun 1989, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat mengoperasikan atau mendirikan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong,¹

Sebagai bentuk realisasi dari dibukanya secara resmi hubungan daerah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur (Entikong-Tebedu) pada tahun 1967.² Selanjutnya yang akan menjadi prioritas pembangunan kawasan perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat adalah rencana pembukaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas Aruk karena sudah ada perubahan PPLB. Rencana tersebut

¹ Profil Daerah, Kabupaten Dan Kota, Kompas, Jakarta, 2003, hal 169.

² Perjanjian Kerjasama di dalam Basic Arrangement On The Trade And Economics Relations antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, tahun 1967.

nantinya akan merealisasikan hubungan daerah perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur (Aruk-Biawak).³

Propinsi Kalimantan Barat sudah memperjuangkan ke Pemerintah Pusat agar segera dikeluarkan payung hukum berupa Perpres tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan dan Pembentukan Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perbatasan yang sampai saat ini masih dalam proses di Jakarta. Oleh karena itu, sambil menunggu terbentuknya badan tersebut Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat telah membentuk sebuah lembaga yaitu Badan Persiapan Pengelolaan Kawasan Perbatasan (BP2KP).⁴

Kebijakan pemerintah pada kawasan perbatasan ini tentu saja membawa dampak yang baik bagi daerah ini, dampak tersebut yaitu seperti meningkatnya kegiatan perekonomian daerah terutama sekali dalam bidang perdagangan yang terjadi antar kedua negara. Sehingga dari tingginya aktivitas ekonomi yang terjadidi kawasan perbatasan Aruk bisa dijadikan sebagai faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

Meskipun memiliki nilai yang strategis dan potensial untuk dikembangkan, hal ini tidak dibarengi dengan upaya lebih lanjut dari pemerintah dalam mengembangkan kawasan ini serta melindungi kawasan perbatasan ini. Sehingga tidak heran apabila kawasan perbatasan perbatasan Aruk ini masih merupakan kawasan tertinggal yang mempunyai tingkat kerawanan yang tinggi seperti

³ Pontianak Post, Malaysia Tunda Pembukaan PPLB Aruk dan Badau, Rabu 27 Juni 2007, hal 10.

⁴ Pontianak Post, Pembukaan PPLB Aruk dan Badau Sesuai Kesepakatan, Senin 9 Juli 2007, hal 26.

perdagangan ilegal, illegal logging, perubahan tapal batas wilayah dan lain sebagainya. Oleh karena itu muncullah kesenjangan maupun ketimpangan yang sangat kontras antara perbatasan Indonesia dan Malaysia baik jika dilihat dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. Hal-hal inilah yang dapat merupakan ancaman bagi Indonesia sendiri dan menurunkan martabat Indonesia di mata dunia Internasional.

Berangkat dari apa yang telah dipaparkan diatas maka penulis mencoba untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut mengenai kebijakan ataupun tindakan apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengembangkan kawasan ini sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan Aruk.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah kebijakan atau strategi yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah setempat pada khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya dalam mengembangkan kawasan perbatasan Aruk-Biawak.
2. Berusaha untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kendala-kendala maupun peluang-peluang yang didapat oleh pemerintah dalam mengembangkan kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Sumatera

3. Mencoba untuk memanfaatkan dan mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan mengenai Hubungan Internasional, yang mana selama ini telah didapat di bangku perkuliahan.

C. Latar Belakang Masalah

Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki perbatasan darat secara langsung dengan negara lain. Perbatasan negara di Propinsi Kalimantan Barat ini berada di belahan utara yang berhadapan langsung dengan n

egara Malaysia yaitu Sarawak sepanjang kurang lebih 857 km yang melintasi lima kabupaten di Kalimantan Barat yaitu kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan kapuas Hulu, termasuk didalamnya 14 wilayah kecamatan dan 95 desa. Dan kawasan perbatasan ini merupakan salah satu barometer tingkat pembangunan daerah dan dan juga nasional terutama dalam hal karakter fisik, sosial budaya, dan ekonomi wilayah.

Kawasan perbatasan Kalbar – Sarawak yang membentang sepanjang sekitar 850 kilometer, mempunyai luas sekitar 2,1 juta hektar, atau hampir seluas propinsi Nusa Tenggara Barat, atau propinsi Sulawesi Utara. Secara administratif, kawasan ini meliputi 5 wilayah kabupaten dan 98 buah desa, dengan penduduk berjumlah sekitar 180.000 orang, atau kepadatan penduduk hanya 0,1 jiwa per hektar.

Terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32 kampung di Sarawak, sementara yang disepakati kedua negara 16 buah titik di Kalbar dan 10 buah titik di Sarawak - sedang yang sudah ditetapkan sebagai pos lintas batas saat ini hanya satu buah, yaitu Entikong (Kalbar) — Tebedu (Sarawak).

Dari lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Sambas dengan Aruk Kecamatan Sajingan Besar merupakan salah satu daerah perbatasan yang kondisinya dinilai baik setelah Entikong . sebagai sebuah kawasan perbatasan, Aruk merupakan sebuah kawasan ataupun daerah yang mempunyai arti yang sangat penting dan nilai strategis bagi Negara, dimana nilai-nilai penting tersebut ditentukan oleh kegiatan yang berlangsung di kawasan ini.

Nilai penting tersebut seperti : memiliki dampak penting bagi kedaulatan Negara karena sebagai daerah yang berdekatan dengan Negara lain maka orientasi social ekonomi penduduk setempat lebih cenderung ke negara tetangga sehingga dapat mengikis rasa nasionalisme bangsa dan selain itu lebih mudah mendapatkan pengaruh dari luar yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak kepada keutuhan bangsa dan lain sebagainya, selain itu perbatasan juga memiliki potensi sumber daya alam yang merupakan factor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan social ekonomi masyarakat didalam maupun diluar. Sebagai kawasan perbatasan, kawasan ini memilki keterikatan yang kuat dan saling mempengaruhi

dengan kegiatan yang berlangsung di wilayah ini.

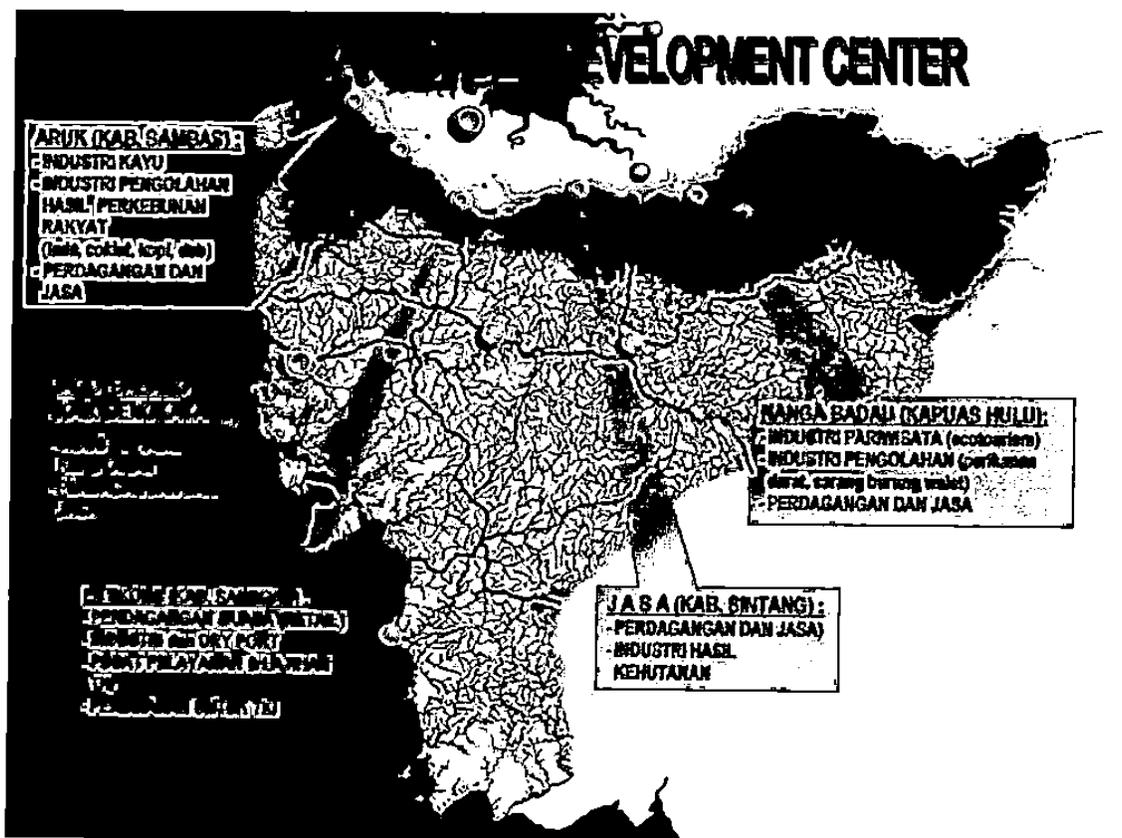
lingkup nasional maupun internasional dan selain itu kawasan ini juga mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan dan keamanan nasional karena pada umumnya pada daerah perbatasan ini memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi seperti perdagangan illegal, illegal logging, transnational crimes dan lain sebagainya. Oleh karena itu perbatasan negara ini dapat dikatakan memegang peranan penting dalam penentuan batas wilayah, pemanfaatan sumberdaya alam, menjaga keamanan dan juga keutuhan wilayah sebuah negara.⁵

Dari nilai-nilai strategis yang dimiliki oleh daerah Aruk ini telah menghasilkan dampak positif dan negatif bagi daerah maupun negara. Salah satu dampak positif yang ada pada Aruk adalah kawasan ini yaitu memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi, hal ini terlihat pada kondisi ekonomi di kawasan Aruk dimana tingkat aktivitas yang terjadi diantara kedua Negara sangat tinggi. Perkembangan volume dan nilai barang yang keluar masuk semakin hari memperlihatkan peningkatan yang tinggi. Selain arus barang yang masuk, peningkatan juga terjadi pada arus orang dan kendaraan. Tingginya aktivitas keluar masuknya arus barang, kendaraan dan orang di perbatasan ini kemudian telah berdampak pada sektor lainnya yaitu seperti pada sector perdagangan, restoran, hotel dan lain sebagainya, dan hal ini tentu saja memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah.

⁵ www.google.com, Eddy MT. Sianturi, SSI dan Nafsiah, SP, Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Kedaulatan NKRI, Penelitian Kualitatif, Studi Kasus, Diklat.

Potensi ekonomi yang ada ini juga didukung oleh letak geografis Aruk yang strategis, karena kawasan perbatasan Aruk ini terletak pada jalur lalu lintas nasional dan juga internasional yaitu pada jalur lalu lintas Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu, selain itu juga terletak pada jalur trans Kalimantan yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Tengah, sedangkan pada jalur internasional kawasan ini terletak pada jalur Trans Borneo Sarawak dan Brunai Darussalam, ini juga merupakan nilai tambah bagi kawasan ini dalam mendukung aktivitas perekonomian.

Gambar. 1.1
Peta Daerah Perbatasan (*Border Development Center*) Kalimantan Barat



Sumber: Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Di Propinsi Kalimantan Barat, Disampaikan Pada rapat Penanganan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Di Kantor Wakil Bupati, Pontianak, 10 April 2007

Selain itu faktor pendukung lainnya adalah kawasan ini juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, dimana potensi-potensi tersebut berasal dari sektor kehutanan (hutan produksi dan taman nasional), perkebunan, perikanan air tawar, pertanian dan lain sebagainya yang apabila dapat dikembangkan dengan baik maka akan dapat menjadi asset bagi pemerintah setempat untuk lebih meningkatkan kegiatan ekonomi yang ada.

Akan tetapi meskipun kawasan perbatasan Aruk ini memiliki nilai-nilai yang potensial, hal tersebut tidak diseimbangkan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengembangkan kawasan tersebut sehingga timbulah dampak negatif dari hubungan antara kedua negara ini. Dampak negatif ini dapat dilihat dari kondisi sosial dan ekonomi yang di kawasan perbatasan Aruk yang merupakan daerah yang kurang berkembang (terbelakang), hal ini disebabkan antara lain oleh lokasinya yang relatif terisolir / terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah sehingga menyebabkan langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima masyarakat di daerah perbatasan. Rendahnya tingkat pendidikan, kesejahteraan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat daerah perbatasan Aruk. Alat tukar / belanja di wilayah perbatasan lebih banyak menggunakan mata uang Ringgit Malaysia daripada rupiah, dikarenakan jarak tempuh serta terdapat perbedaan harga yang menyolok terutama untuk kebutuhan sembako sehari-hari, sehingga masyarakat di perbatasan lebih senang membeli dan menggunakan mata uang Ringgit Malaysia daripada rupiah.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Aruk umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial ekonomi di negara Malaysia. Kondisi ini mengundang kerawanan di bidang politik, karena meskipun orientasi masyarakat masih terbatas pada bidang ekonomi dan sosial, namun dimungkinkan adanya kecenderungan untuk bergeser ke soal politik, terutama apabila kehidupan ekonomi masyarakat daerah perbatasan mempunyai ketergantungan kepada perekonomian negara tetangga, maka hal inipun selain dapat menimbulkan kerawanan di bidang politik juga dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Aspek pertahanan keamanan kawasan perbatasan Aruk merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah sulit dilaksanakan, serta pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Ditambah lagi dengan perbedaan sistem hukum antara Malaysia dan Indonesia menjadi kendala dalam penyelesaian masalah-masalah hukum, karenanya proporsionalitas tugas Kepolisian terutama masalah keamanan dan penegakan hukum ada perbedaan.⁶

Oleh karena itu sejalan dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah Kalimantan Barat berusaha untuk mengedepankan pembangunan di kawasan perbatasan tersebut sebagai upaya untuk mendorong pembangunan nasional maupun daerah. Berdasarkan hal-hal tersebutlah pemerintah kemudian merasa perlu untuk

⁶ Kebijakan Pengembangan Kawasan Perbatasan Di Propinsi Kalimantan Barat, Disampaikan Pada

mengambil tindakan ataupun kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Aruk-Biawak.

D. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yaitu:

Strategi apa yang akan dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat terhadap pengembangan daerah kawasan perbatasan Aruk-Biawak?

E. Kerangka Dasar Teori

Dari apa yang telah dipaparkan diatas maka diketahui bahwasanya perbatasan merupakan sebuah daerah yang memiliki arti yang sangat penting bagi sebuah negara, serta memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, mampu atau tidaknya pemerintah dalam menjaga kawasan tersebut tergantung dari perhatian tindakan pemerintah sendiri. Oleh karena itu untuk membahas permasalahan-permasalahan diatas penulis menggunakan 2 teori / konsep sebagai berikut yaitu Teori Decision Making dan

1. Teori Decision Making

Menurut William D. Coplin

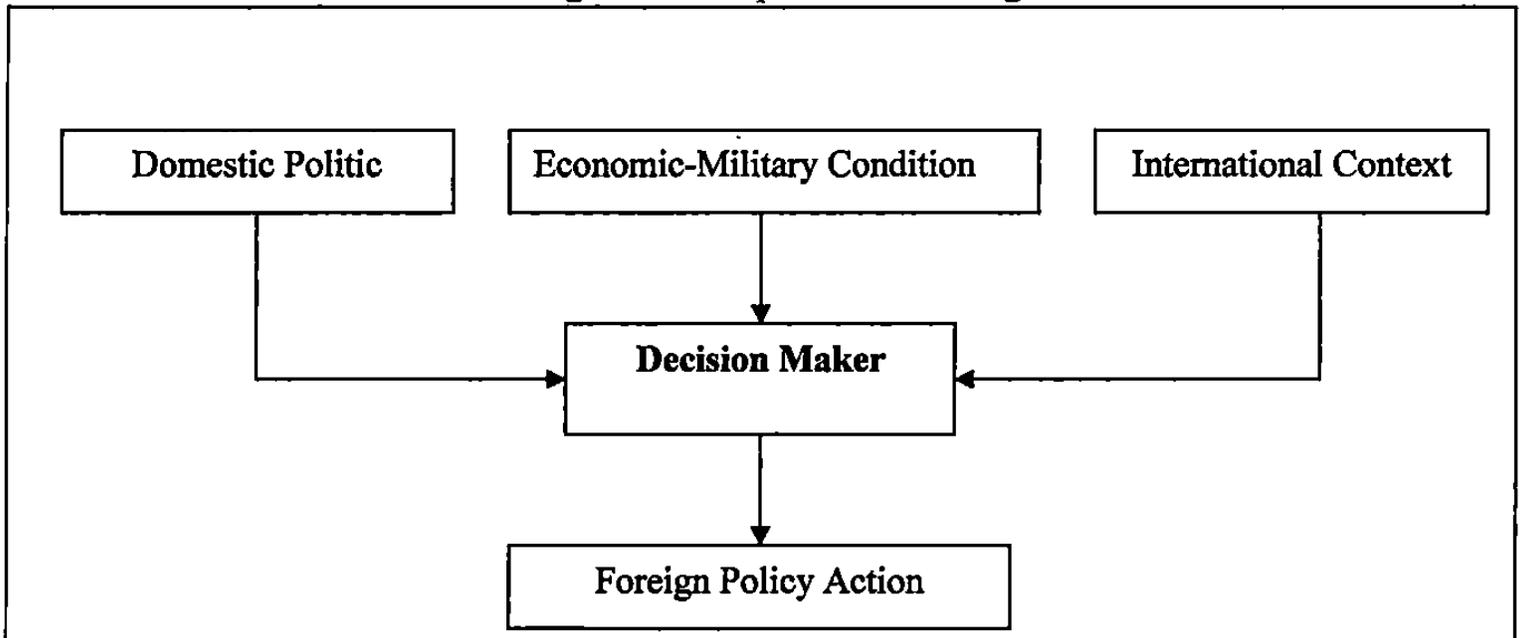
*“To be interested in why states behaves as do interest area. We have to be interested in why their leaders make the decision. However it would be mistake to think that foreign policy act maybe viewed as the result of three boardcategories of considerations affecting the foreign policy decision makers state. The second is the economy and military capability of the state. The third is the international context the particular position in which his state finds it self specially in relation to other statein system”.*⁷

Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri: pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer Negara tersebut termasuk factor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi).”

⁷ William D. Coplin, *Decision Making in International Relations*, New York: McGraw-Hill, 1974, hal. 100.

Untuk lebih jelasnya ilustrasi dibawah ini akan menjelaskan interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri.

Gambar .1.2.
Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri



Sumber: William D. Coplin, , Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis, Bandung, CV. Sinar Baru, 1992, Ed-2,p.30.

Proses politik luar negeri adalah suatu mekanisme bagi suatu sistem politik untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk mengendalikan lingkungan itu demi mencapai tujuannya. Menelaah politik luar negeri dari sudut pandang pembuat keputusan berarti menempatkan suatu keputusan politik luar negeri tertentu atau serangkaian keputusan politik luar negeri sebagai sasaran analisis. Maksud utama penelaahan proses pembuatan keputusan adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimana proses keputusan mempengaruhi isi keputusan yang dihasilkan. Dalam proses pembuatan keputusan ini penulis menggunakan model aktor rasional dimana negara merupakan aktor rasionalnya agar lebih mudah dalam

menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan luar negeri. Dalam model ini politik luar negeri dianggap sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional terutama pemerintah yang monolit yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan.

Pembuatan keputusan politik luar negeri ini digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku yang terkoordinasi dan bernalar. Dalam analogi ini individu dengan serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada.

Jadi unit analisa model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian analisis politik luar negeri ini harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, dimana alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintah dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif tersebut harus menggunakan kriteria optimalisasi hasil. Para pembuat kebijaksanaan ini digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan dalam kebijaksanaanya.⁸

Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin untuk dilakukan dan juga semua sumber-sumber yang ada yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Model ini sangat terkenal dalam proses pembuatan keputusan karena dalam model ini para pembuat keputusan

⁸ Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1999.

dianggap rasional dan pada umumnya kita juga cenderung berpikir bahwa keputusan terutama yang menyangkut politik luar negeri dibuat juga secara rasional.

Adapun variabel ini meliputi berbagai atribut nasional yang mempengaruhi politik luar negeri, misalnya ukuran besar, lokasi geografik, iklim, dan sumberdaya dari suatu negara. Suatu negara-bangsa kontinental dengan perbatasan yang mudah ditembus dan dengan letak yang strategis bisa diduga akan mengembangkan strategi ofensif (misalnya, mencari perbatasan yang lebih aman atau mencari tempaywilayah penyangga yang yang bisa dijadikan perisai) atau mencari perlindungan dari negara-bangsa lain yang lebih kuat dan mampu aktif dimana-mana. Sebaliknya, suatu negara-pulau atau negara yang dkitari oleh benteng alam yang tak mudah ditembus lebih mungkin bersifat defensif dan menghindari keterlibatan dalam aliansi, yang bisa mengurangi kedaulatannya.⁹

Sebagai sebuah negara yang berbatasan langsung dengan negara lainnya, perbatasan memiliki arti penting bagi sebuah negara baik itu dalam bidang ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya, oleh karena itu apapun aktivitas ataupun hubungan yang terjadi di kawasan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berdampak kepada aspek nasional maupun internasional. Maka dari itu kebijakan domestik yang akan dijalankan di kawasan ini juga pada akhirnya akan berdampak pada kebijakan politik luar negeri Indonesia kepada Malaysia.

⁹ Mohtar Masoed, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal 145

Berdasarkan tingkat kerawanan dan nilai-nilai potensial yang dimiliki oleh perbatasan ini, maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan merasa perlu untuk mengambil tindakan ataupun memutuskan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah tersebut, ataupun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah yaitu rencana untuk mengembangkan kawasan perbatasan yang mana hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional ataupun pembangunan nasional serta untuk melindungi kedaulatan negara. Jadi penggunaan teori Decision Making yang dipergunakan penulis disini adalah untuk menjelaskan mengapa keputusan tersebut penting untuk diambil dan direalisasikan oleh pemerintah.

2. Konsep Kepentingan Nasional

Selain teori Decision Making, konsep lainnya yang mendukung dalam memecahkan permasalahan yaitu Konsep Kepentingan Nasional. Konsep kepentingan nasional ini adalah yang paling populer didalam analisa hubungan internasional, baik itu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional, selain itu konsep ini juga sering dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu Negara dan sebagai pengukur keberhasilan suatu politik luar negeri yaitu untuk evaluasi.¹⁰ Konsep ini didukung oleh Hans J. Morgenthau.

¹⁰ Mohtar Mas'ud, Ilmu Hubungan Internasional: disiplin Dan Metodologi, LPPS, Jakarta, 1999, h. 11

Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional jadi bukan pada alasan-alasan moral, legal, dan ideology yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya.

Maka dapat dikatakan bahwa menurut Morgenthau, esensi dari politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Maksudnya adalah politik luar negeri suatu Negara harus didasarkan kepada kepentingan politik domestic atau dapat dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan kedalam kepentingan nasional Negara tersebut. Kepentingan nasional ini diartikan sebagai kelangsungan hidup (survive) yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik, mempertahankan rezim politiknya dan memelihara identitas kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik, negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya); mempertahankan rezim ekonomi politiknya (yaitu identitas politiknya), yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis, atau komunis dan sebagainya; serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistic dan sejarahnya (yaitu identitas kulturalnya).¹¹

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam konsep kepentingan nasional yang telah dijelaskan diatas maka untuk melindungi kawasan perbatasan Aruk, Indonesia, serta memanfaatkan potensi yang ada di kawasan perbatasan ini maka untuk itu pemerintah daerah melakukan upaya-upaya maupun tindakan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan melalui strategi pengembangan

kawasan serta melakukan kerjasama dengan Pemerintah Negeri Sarawak melalui Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Malaysia – Indonesia Tingkat Daerah (KK SOSEK MALINDO).

Mengingat akan letaknya yang strategis yaitu pada alur lalu lintas nasional dan internasional dan memiliki sumber daya alam yang potensial serta mengingat akan permasalahan dari perbatasan baik yang berskala lokal, nasional maupun internasional yaitu seperti minimnya sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, kejahatan lintas batas dan lain sebagainya, maka rencana pengembangan kawasan yang akan dijalankan oleh pemerintah ini direncanakan akan mencakup pada berbagai bidang. Hal ini dilakukan berdasarkan kepentingan nasional negara Indonesia sendiri dalam mempertahankan kedaulatan negara serta untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya yang mana dalam hal ini akan diwujudkan dengan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah perbatasan dan lebih memperkuat pengawasan terhadap kawasan ini.

F. Hipotesis

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat terhadap kawasan perbatasan Aruk adalah pengembangan prasarana kawasan serta kerjasama Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak.

G. Metodologi Penelitian

Untuk penelitian data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis mencoba untuk menggunakan metodologi pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Penulis melakukan dokumentasi data sekunder yaitu dengan menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan menggunakan buku-buku literature, majalah, akses internet dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Untuk mendapatkan data primer yaitu dengan menggunakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data dari pihak maupun instansi terkait. Adapun pihak-pihak ataupun instansi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. BAPPEDA Propinsi Kalimantan Barat
2. PEMDA Propinsi Kalimantan Barat
3. PEMDA Kabupaten Sambas

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang menjadi titik perhatian penulis adalah berkisar dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. hal ini dikarenakan selain untuk mempermudah penulis dalam penelitian, juga dikarenakan pada jangka waktu 2000 dan 2004 ini kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Aruk-Biawak mulai dilakukan secara intensif. Dengan adanya Propenas 2000-2004 yang mana telah memberikan kebijakan dasar bagi pembangunan daerah perbatasan , maka program aksi pembangunan daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak mulai

direalisasikan oleh pemerintah dari tahun 2002 hingga tahun 2004, yang mana dari tahun 2004 ini, program pembangunan kawasan perbatasan akan dilanjutkan sampai dengan sepuluh tahun kedepan, dan untuk Pengembangan Ekonomi Perbatasan Pemerintah mencoba memperankan fungsi kawasan perbatasan ini menjadi Pusat Pengembangan Kawasan Perbatasan Terpadu (*Border Development Centre-BDC*).

I. Sistematika Penulisan

Bab I, berisi mengenai pendahuluan seperti yang telah diuraikan penulis diatas dimana dalam bab ini menjelaskan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah disertai dengan penjelasan kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan jangkauan penelitian.

Bab II, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, kondisi alamnya dan geografis, serta perekonomian dan pembangunan di perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas.

Bab III, berisi paparan mengenai dampak pengembangan kawasan perbatasan Aruk terhadap hubungan antara kedua Negara di kawasan perbatasan Aruk serta dampak-dampak positif maupun negatif yang timbul dari hubungan tersebut.

Bab IV, berisi mengenai strategi dalam usaha pengembangan kawasan perbatasan Aruk oleh Pemerintah daerah Kalimantan Barat dan kendala-kendala kerjasama antara Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dengan Negeri Sarawak.

Bab V, merupakan kesimpulan dari seluruh isi materi penulisan ini yang mana merupakan rangkuman dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya